



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG**

JL. ADE IRMA NO. 06 WALIKOTA, KUPANG – NTT 85228

TELEPON 0380 - 8431324, 881340

LAMAN <https://kkp.go.id> SUREL skipm.kupang@kkp.go.id

Yth. Sekretaris BPPMHKP
Gedung Mina Bahari II lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110

Kupang, 24 April 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.442/SKIPM.KPG/TU.140/IV/2025

No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal :

Tanda tangan :

Nama jelas :

Setelah ditandatangani, harap dikirimkan kembali melalui email
skipm.kupang@kkp.go.id.



Kepala Stasiun KIPM Kupang,

Ridwan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang**
**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan**
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (LKj SKIPM Kupang) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.



Kupang, 22 April 2025
Kepala Stasiun KIPM Kupang

[Handwritten Signature]
Ridwan, S.St.Pi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI.....	12
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	13
1.4 STRATEGI ORGANISASI.....	16
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	18
2.2. PENGUKURAN KINERJA	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	21
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI	23
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN.....	23
IKS.01.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	24
IKS.01. 2.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	25
IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	32
IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	32
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR.....	38
IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	39
IKS.02.2.Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	39
S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	40



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**



IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	41
IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang ...	41
IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	42
IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	42
IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	43
IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	44
IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	45
IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	45
IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang.....	46
3.3. Realisasi Anggaran.....	48
3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	49
BAB III. PENUTUP	50
3.1 KESIMPULAN.....	50
3.2 REKOMENDASI	50
LAMPIRAN	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang	15
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025	21
Gambar 3. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Triwulan Tahun 2025	44
Gambar 4. Grafik Nilai SKM Per Unsur	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Stasiun KIPM Kupang.....	8
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025.....	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025.....	21
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	24
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	38
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	40
Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	48
Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	48



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome/impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Stasiun KIPM Kupang selama Triwulan I Tahun 2025. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 112,08% (Kategori Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM KUPang pada periode Triwulan I tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 10 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan.
- B. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :
 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang
 4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Kupang
 5. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Kupang
- C. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memiliki nilai capaian pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
 2. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**



3. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup lingkup Stasiun KIPM Kupang
6. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Kupang
7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Kupang
8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Kupang
9. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Kupang
10. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Stasiun KIPM Kupang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	-	-	
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN
akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)		-	-	
	9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)		-	-	
	10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)		-	-	
	11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)		-	-	
	12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)		85	100	117,65
	13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)		76	100	120,00
	14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)		-	-	
	15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)		88	90,8	103,26

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 800.489.114,- atau sebesar 18,10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.422.198.000,-. Anggaran Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.291.609,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I tahun 2025, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 112,08, dimana kegiatan masih tetap terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta



pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Stasiun KIPM Kupang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan



4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama Gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. LKj Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang.

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Stasiun KIPM Kupang mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM Kupang mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya



Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun KIPM Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis yang berada dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Saat ini Stasiun KIPM Kupang masih menunggu terbitnya struktur organisasi dan tata kerja yang terbaru. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,



BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

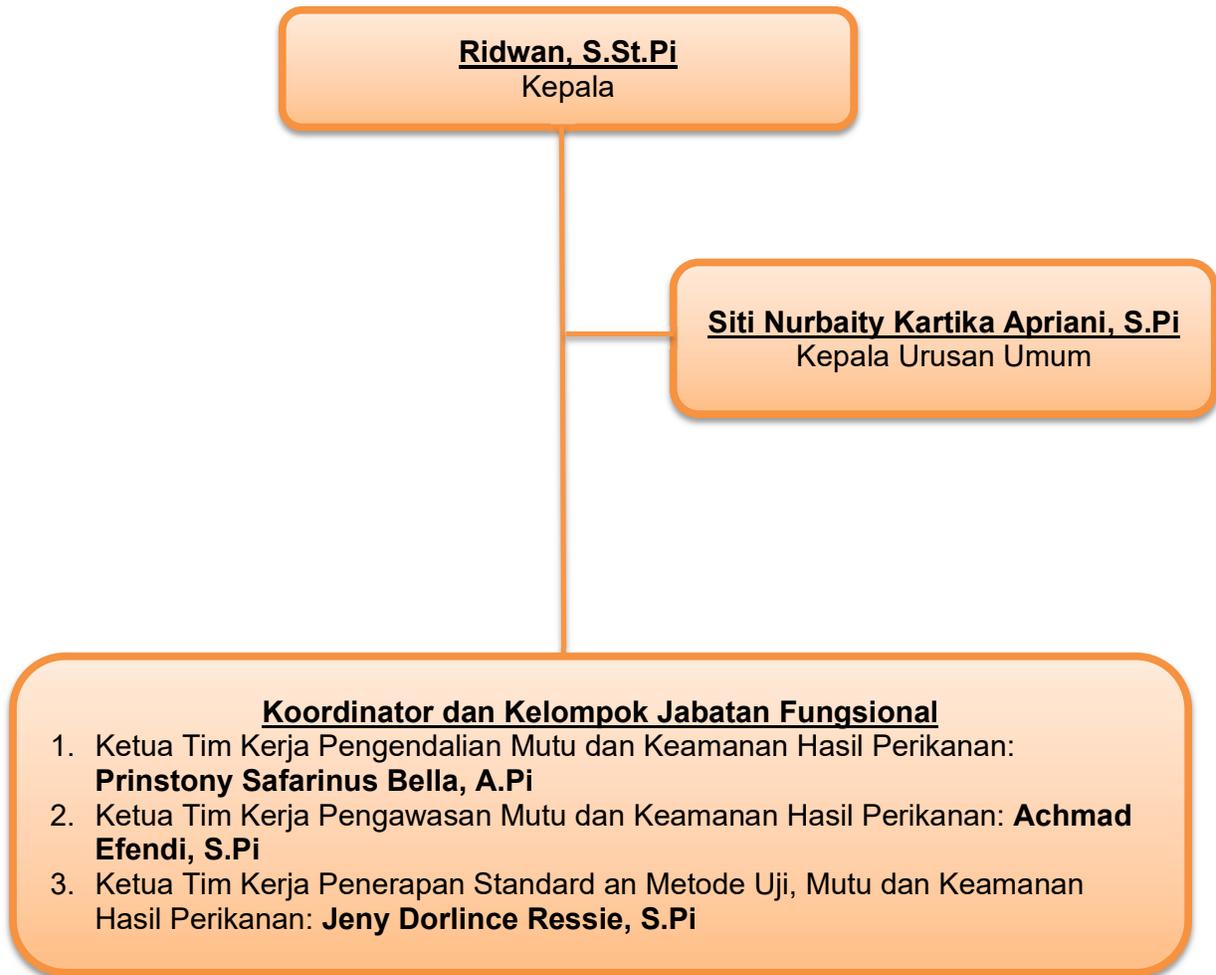
- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Pelayanan dan Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, dan 5 Orang Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 2 orang Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 1 Orang Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil dan 4 orang Fungsional Umum serta 10

orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 7 orang Tenaga Kontrak (PJLP). Struktur organisasi Stasiun KIPM Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang



1.4 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan. Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 :Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar, dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP. Selanjutnya berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ada 15 Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Daftar sasaran kinerja, indikator kinerja serta target kinerja SKIPM Kupang pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan *stabilize*.



Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

5.

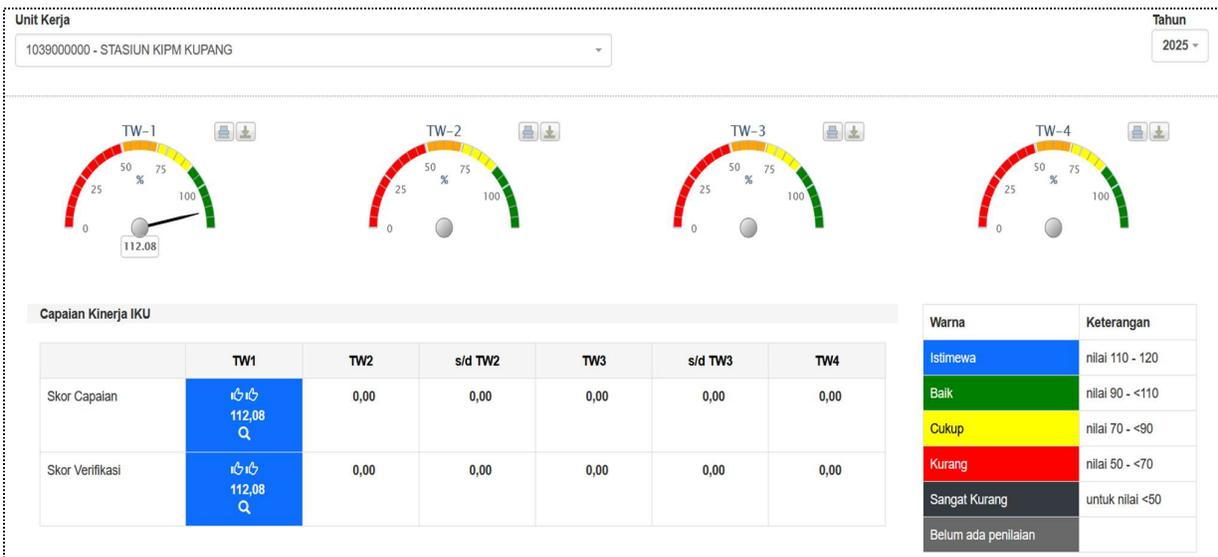
BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 – 120 Istimewa	90 -< 110 Baik	70 -< 90 Cukup	50 -< 70 Kurang	<50 Sangat Kurang



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 112,08 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 112,08; nilai hasil verifikasi juga sama yaitu 112,08 dimana artinya data dukung yang dilampirkan sudah sesuai dengan capaian hasil kinerja. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan I Tahun 2025. Nilai – nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
SK.1	Terselenggarakan ya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
	Kelautan Perikanan	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120,00
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	-	-	
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	-	-	
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	117,65
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88	90,8	103,26

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Stasiun KIPM Kupang, adalah sebagai berikut :

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang



Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	Target
S01. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
IKS 01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	70	100	120,00	70
IKS.01.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	1
IKS.01.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	99	100	101,01	99

IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan



pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum ada target dan capaian kinerja karena belum ada permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Namun sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pada tanggal 21 Februari 2025 dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal, yang dilaksanakan di Labuan Bajo atas kerja sama WWF Indonesia dan Stasiun KIPM Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh 30 nelayan lingkup Nusa Tenggara Timur.
2. Bimbingan dilakukan kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi, dimana Stasiun KIPM Kupang dan Penyuluh Perikanan turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan.

Untuk selanjutnya pada triwulan II akan melakukan tindaklanjut terhadap permohonan sertifikasi yang direncanakan akan diajukan oleh pelaku usaha. Selain itu juga, direncanakan untuk melakukan koordinasi dengan DJPT, DJPB, dan BRSDM terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis.

IKS.01.2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari



pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier / Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
- b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

Pada Triwulan I tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.



Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut *Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP* adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/ HACCP melalui HACCP *Online System* (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.

- ❖ Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
- ❖ Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
- ❖ Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 1 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 1 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 1 ruang lingkup sehingga target tercapai 100%.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (haccp online system) per triwulan. Pada triwulan 1 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang telah menerima permohonan Sertifikasi HACC sebanyak 4



ruang lingkup oleh Unit Usaha Pengolahan dan terealisasi sebanyak 4 ruang lingkup produk HACCP dengan demikian telah terealisasi 100%.

3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam 1 triwulan.

$$X = \frac{A + B}{Xn}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

Xn = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{100 + 100}{2} = \frac{200}{2} = 100 \quad X = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Prroduksi Pasca Panen Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 70%; Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :

- a. 1 Sertifikat SKP untuk 1 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Rumput Laut Kering
- b. 4 Sertifikat HACCP untuk 3 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Ikan Kering dan Ikan Segar, Udang segar dan Ikan Demersal segar.

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi SKP Triwulan I Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1	Yayasan Nusatenggara Vokasi	Rumput Laut Kering	B	35136/53/SKP/KR// 2025 6 Januari 2025

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP Triwulan I Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1	UD. Bunga Lontar	Dried Fish	C	218/PM/HACCP/PK/ 02/25 29 Februari 2025
2	CV. Elitism	Fresh Groupher	C	066/PM/HACCP/PS/ 03/25 06 Maret 2025
3.	CV. Elitism	Fresh Shrimp	C	067/PM/HACCP/PS/ 03/25



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**



No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
				06 Maret 2025
4.	PT. Onedegreefish Indonesia Maumere	Frozen Pelagic Fish	B	481/PM/HACCP/PB/03/25 29 Maret 2025

- ❖ Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan rician sebagai berikut :
 1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Rp.30.000.000,-
 2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar Rp. 35.000.000,-
 3. Sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP Ruang Lingkup Produk pada Unit Pengolahan Ikan Rp. 35.000.000,

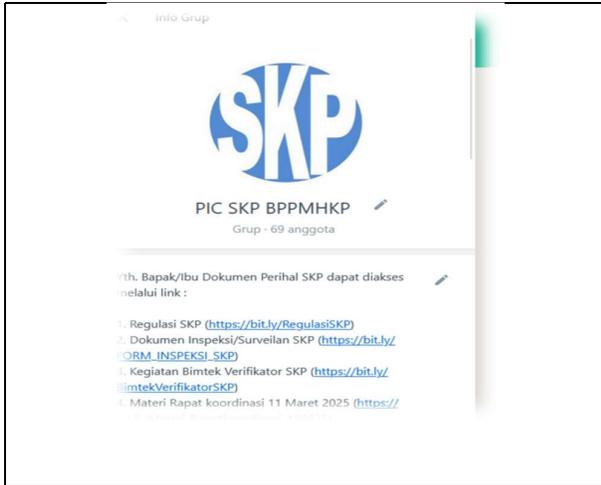
- ❖ Realisasi Anggaran pada kegiatan Produksi Pasca Panen pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.3.932.500,- atau 3,93%dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sertifikasi SPDI	30.000.000	-	30.000.000
2.	Sertifikasi SKP	35.000.000	600.000	34.600.000
3.	Sertifikasi PMMT / HACCP	35.000.000	3.332.500	31.667.500
	Jumlah	100.000.000	3.932.500	68.332.500

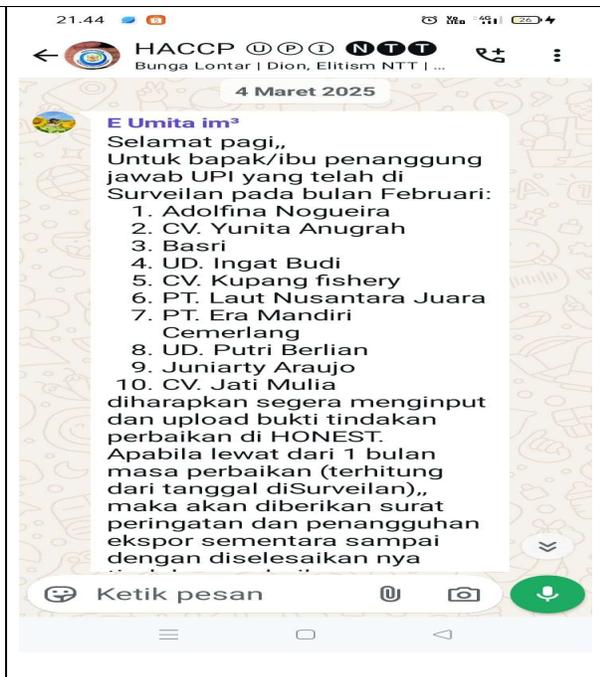
- ❖ Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan verifikasi SKP dan Inpeksi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu/HACCP adalah sebanyak 5 orang Inspektur Mutu dari Stasiun KIPM Kupang.
- ❖ Inspektur Mutu mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Petugas UPT & Pusat dalam rangka sertifikasi SKP dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat Mutu Pascapanen. Peserta yang bergabung melalui zoom meeting sebanyak 226 orang yang berasal dari inspektur mutu lingkup Badan PPMHKP.
- ❖ Melakukan komunikasi dengan antara petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui *whats up group PIC SKP BPPMHKP* untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**



- ❖ Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam *whats up group HACCP UPI NTT* untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan	Timja Pengendalian	Triwulan 2,3,4



Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP	Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP)	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait refreshment / bimtek HACCP, SKP, SPDI untuk Inspektur Mutu	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025

IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan

Perhitungan capaian indikator kinerja lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Kupang dilakukan pada Semester II.

IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP. Kewajiban melengkapi SMKHP sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia untuk tujuan:



- a. konsumsi; dan
- b. nonkonsumsi.

SMKHP untuk Hasil Perikanan konsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:

1. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
2. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
3. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.

SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat **SMKHP** adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMHKP terdiri dari beberapa jenis / model dengan negara tujuan yang berbeda antara :

- ❖ SMKHP untuk Non Negara Mitra (Model H); contoh : Singapura, Timor Leste, Australia dan Malaysia;



- ❖ SMKHP untuk Negara Mitra (Model A,B,C,D,E,F dan G) merupakan jenis SMKHP yang telah disepakai oleh negara tujuan sesuai bentuk dan isinya; Contoh : USA, Uni Eropa, Inggris, China, Korea, Vietnam.

Pada Triwulan I tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi SMHKP antara lain:

- a. Sertifikat SMHKP ke Negara Mitra;
- b. Sertifikat SMKHP ke Negara Non Mitra;

Capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor diperoleh dari Jumlah SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP dikurangi dengan Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan dan diperbandingkan dengan jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan ekspor.

$$X = \frac{A - B}{A} \times 100 \%$$

X = Rasio Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor (%)

A = SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP

B = Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan

$$X = \frac{156 - 0}{156} = \frac{156}{156} \times 100\% = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan yang diterima negara tujuan Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 70% karena tidak ada penolakan terhadap SMKHP atau Hasil Perikanan yang diekspor

Output dari kegiatan Sertifikasi SMKHP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :

- c. 1 Sertifikat SMKHP Model A untuk Unit Usaha Pengolahan Ikan yang mengekspor ke Negara Mitra yaitu Korea berupa Ikan Asap;
- d. 155 Sertifikat SMKHP Model H untuk negara Non Mitra yang mengirim ke negara Timor Leste, Singapura, Australia dan German berupa Ikan Demersal Segar, Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal segar, Ikan Kering dan Powder Rumpit Laut.
- e. Pada 22 Januari 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan Sosialisasi terkait Sertifikasi SMKHP dan Penarikan PNBP yang berlaku di UPT BPPMHKP.



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TA. 2025**

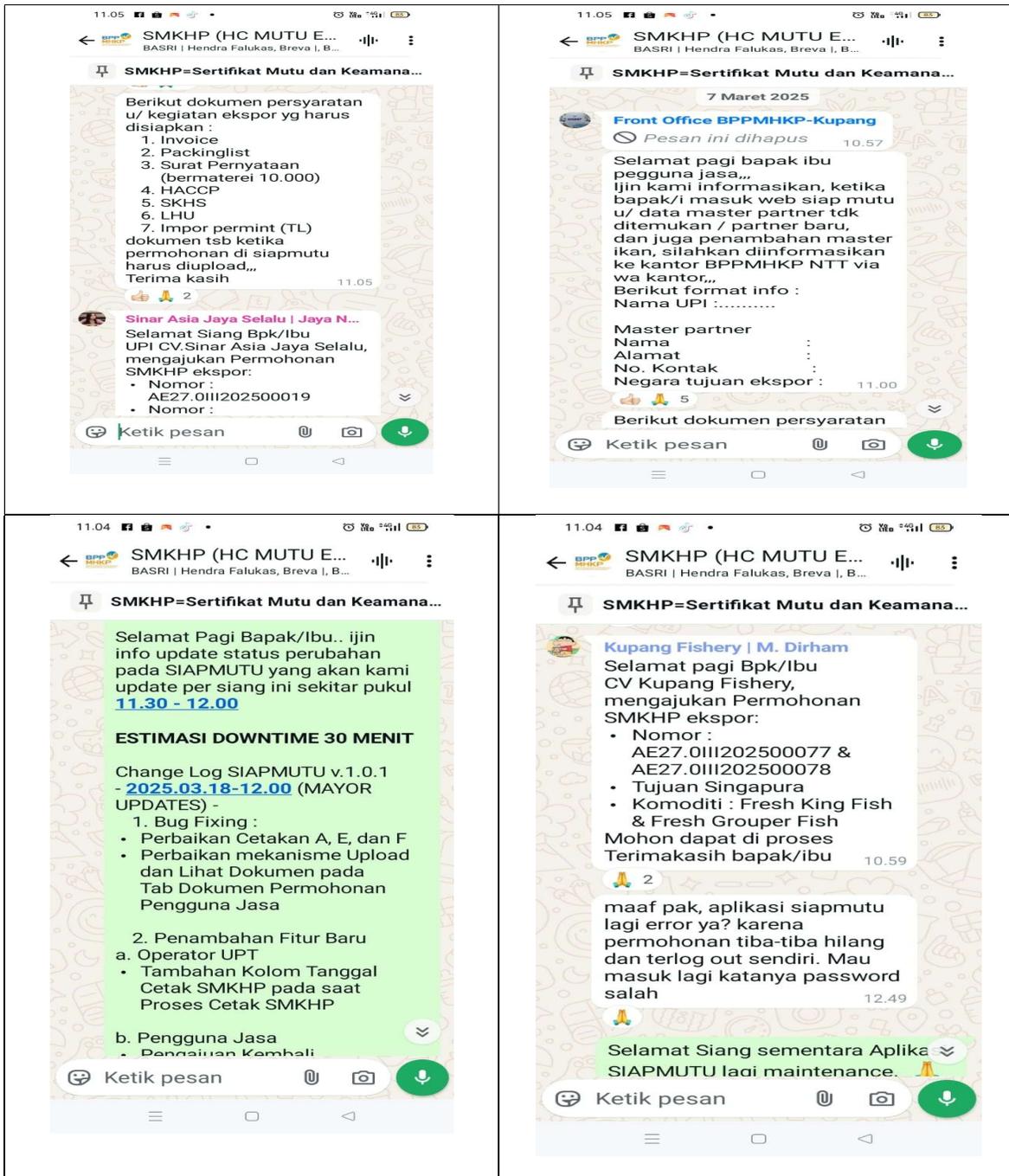


Dihadiri oleh Tim Inspektur Mutu SKIPM Kupang dan Para Pelaku Usaha Ekspor Hasil Perikanan perseorangan maupun perusahaan sejumlah 30 Orang di Ruang Rapat Stasiun KIPM Kupang.





- g. Melakukan komunikasi dengan antara petugas Verifikasi permohonan SMKHP dengan Pengguna Jasa / Pelaku Usaha melalui whats up group SMKHP (HC Mutu Ekspor) terkait permohonan, sertifikasi SMKHP dan permasalahan dalam aplikasi Siapmutu SMKHP.





Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Tim Verifikator SMKHP lingkup Stasiun KIPM Kupang	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Administrator Pusat terkait aplikasi Siapmutu SMKHP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi SMKHP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025

S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Sasaran kegiatan 2 lingkup Stasiun KIPM Kupang Triwulan I tahun 2025 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan secara tahunan. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025		Renstra 2025 - 2029	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	Target
S02. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar						
IKS 02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70



IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan secara tahunan.

IKS.02.2. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan secara tahunan.



S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincih dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada triwulan I untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincih dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
3. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025		Renstra 2025 - 2029	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	Target
S03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IKS 03.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	92
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	71.50
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	100
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	87
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	85
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	80	85	100	117,65	85
IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	76	100	120,00	76



Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	Target
IKS.03.8	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	96,20	88	90,87	103,26	88

IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

Perhitungan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan per semester sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang



dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Perhitungan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan: Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Perhitungan capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan



Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan setiap semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan: Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian: Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian: Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerja

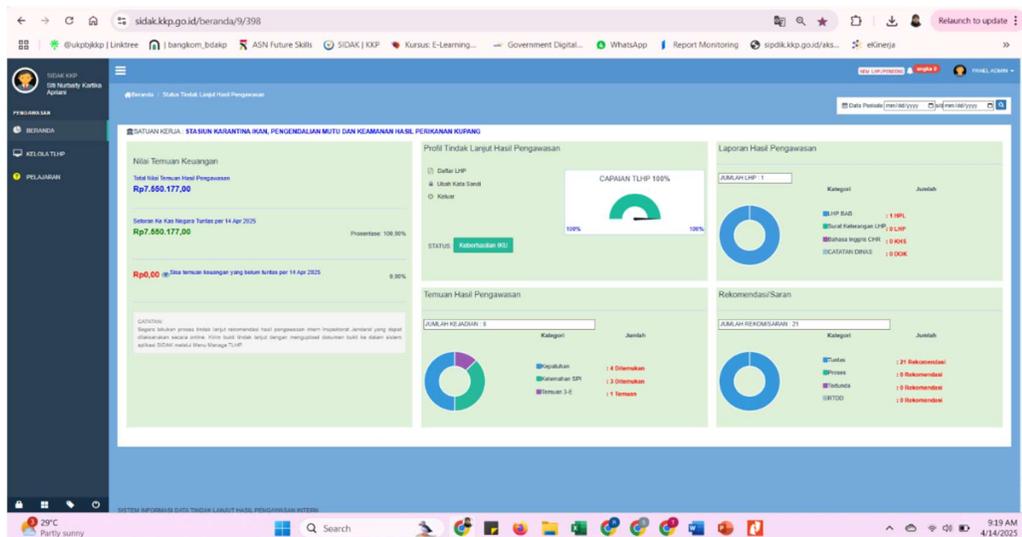
Perhitungan capaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.



IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Stasiun KIPM Kupang yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 85% pada tahun 2025. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun KIPM Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan capture dashboard pada Aplikasi SIDAK.

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang pada periode Triwulan I tahun 2025 adalah 100 % dari target sebesar 85%, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KKP.



Gambar 3. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Triwulan Tahun 2025



IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target yang ditetapkan untuk capaian indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah 76%.sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Sekretariat Jendral KKP Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan unit kerja dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)



- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 dilakukan tahunan.

IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasikuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

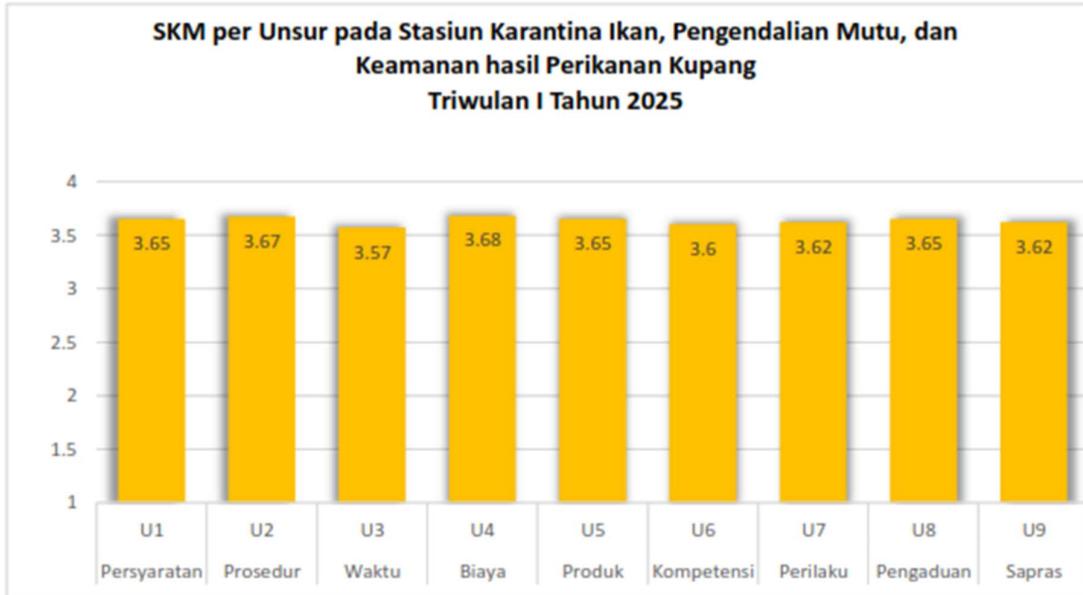
IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25



Pada Triwulan I Tahun 2025, nilai-nilai unsur pelayanan yang diperoleh SKIPM Kupang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,65	3,67	3,57	3,68	3,65	3,60	3,62	3,65	3,62
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,87 (A atau Sangat Baik)								

Perhitungan:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang =

$$\frac{3,65+3,67+3,57+3,68+3,65+3,60+3,62+3,65+3,62}{9} = 3,63$$

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi
= 3,63 x 25 = 90,87

Dari data tersebut diatas yang diberikan oleh 63 responden yang telah



memberikan pendapatnya terhadap 9 (sembilan) unsur yang menjadi objek Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I Tahun 2025, nilai persepsinya diatas angka 3 (tiga). Hal ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Stasiun KIPM Kupang secara umum telah mencerminkan tingkat pelayanan yang baik. Berdasarkan cara pengukurannya, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada angka 90,87% maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Stasiun KIPM Kupang adalah “SANGAT BAIK”.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kupang pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 4,422,198,000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 800,489,114,- atau sebesar 18,10% dari PAGU yang tersedia. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,998,198,000	792,456,614	19,82
2	3989 Pengendalian Mutu	255,000,000	5,032,500	1,97
3	7010 Manajemen Mutu	169,000,000	3,000,000	1,78
	TOTAL	4,422,198,000	800,489,114	18,10

Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	2.147.788,000	465.355.618	21,67
2	Barang	2.274.410.000	335.133.496	14,73
3	Modal	0	0	0
	TOTAL	4.422.198,000	800.489.114	18,10



Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,08 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Stasiun KIPM Kupang telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Stasiun KIPM Kupang untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas Kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan I tahun 2025, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025.
2. Sebanyak Lima (5) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan I memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan OMSPAN adalah Rp800,489,114,- atau sebesar 18,10% dari pagu anggaran Rp4,422,198,000,-.



BAB III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun KIPM Kupang pada periode sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM KUPang pada periode Triwulan I tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 10 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 112,08% (Kategori Istimewa).

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.998.198.000,-
2.	Manajemen Mutu	169.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	255.000.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025		4.422.198.000,-

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Nama Indikator : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 Nama Timja : Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
 Periode Pelaporan : Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian	Target
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan	Th. 2025	Th. 2025
Target	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-
% Capaian	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Stasiun KIPM Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Untuk Triwulan I, belum ada Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal. Namun sudah ada beberapa kapal yang berkoordinasi untuk melakukan permohonan termasuk 3 kapal di Larantuka dan 3 kapal di Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Atas Kapal

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Rekomendasi CPIB Kapal}}{0 \text{ Permohonan CPIB Kapal yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 100\%$$

- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi

pada triwulan I masih nihil, namun sudah ada informasi 2 permohonan di OSS, terdiri dari UUPI atas nama Jahya Ratu Edo yang berlokasi di Kota Kupang dan Evan Nurrochmat di Kabupaten Kupang.

Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Rekomendasi CPIB}}{0 \text{ Permohonan CPIB yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 100\%$$

- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. sertifikasi pada triwulan I masih nihil, namun sudah ada informasi 1 permohonan di OSS, atas nama Natalia Lerick yang berlokasi di Kota Kupang.

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Rekomendasi CBIB}}{0 \text{ Permohonan CBIB yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 100\%$$

- Indikator Kinerja tahun 2025 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, namun sama dengan tahun sebelumnya, per triwulan I kegiatan sertifikasi sama-sama nihil, terdapat 6 sertifikasi pada tahun 2024 yang dikeluarkan pada triwulan IV.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.000.000, yang belum direalisasikan pada tahun 2024, dan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025.:
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada TW I sebanyak 6 orang yang terdiri dari 6 Inspektur 1 auditor CPIB/CBIB, Mutu, 2 PJLP dari Stasiun KIPM Kupang yang didukung oleh Perwakilan 2 orang penyuluh perikanan BRSDMKP. orang PP Untia serta 1 penyuluh swadaya. Sedangkan untuk kegiatan CPIB dan CBIB

Akar Masalah

- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan
- UUPI baik itu budidaya maupun pelaku pembenihan mempunyai kendala dalam melakukan permohonan ke OSS, dikarenakan kendala SDM,

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 21 Februari 2025 dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal, yang dilaksanakan di Labuan Bajo atas kerja sama WWF Indonesia dan Stasiun KIPM Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh 30 nelayan lingkup Nusa Tenggara Timur.
2. Bimbingan dilakukan kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi, dimana Stasiun KIPM Kupang dan Penyluh Perikanan turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan DJPT, DJPB, dan BRSDM terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q2 Tahun 2025

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S.St.Pi



Kupang, 10 April 2025
Ketua Tim Pengawasan Mutu



Heri Kurniawan, S.St.Pi, M.P

BIMBINGAN TEKNIS CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI ATAS KAPAL DI LABUAN BAJO

21 Februari 2025



PENDAMPINGAN SERTIFIKASI CPIB/CBIB



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG

Nama Indikator : Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Kupang

Nama Timja : Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan : Triwulan I Tahun 2025

NAMA SASARAN STRATEGIS	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan
NAMA IK	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN						Capaian TAHUN 2025
	Q1	Q2	SM.I	Q3	Q4	SM.II	
Target	70	0	0	0	0	0	0
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0
% Capaian	120	0	0	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1,2,3,4

SM.I = Capaian Semester I

SM.II = Capaian Semester II

Tahunan = Capaian Akhir Tahun

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- ❖ Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier / Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

- ❖ Pada Triwulan I tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:
 - a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - b. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

- ❖ **Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP** adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :
 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
 2. Unit penanganan ikan hidup;
 3. Unit penanganan rumput laut kering;
 4. Gudang beku;
 5. Gudang dingin;
 6. Gudang kering, dan/atau
 7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

 1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
 2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
 3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

- ❖ **Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point** yang selanjutnya disebut **Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP** adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/ HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
 2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
 3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
 4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
 5. Rekaman Audit Internal

- ❖ Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

- ❖ Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini,

DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.

- ❖ Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
- ❖ Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
- ❖ Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target (jika tidak tercapai Akar Masalah, Mengapa hal tersebut terjadi?)

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 1 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 1 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 1 ruang lingkup sehingga target tercapai 100%.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (haccp online system) per triwulan. Pada triwulan 1 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang telah menerima permohonan Sertifikasi HACC sebanyak 4 ruang lingkup oleh Unit Usaha Pengolahan dan terealisasi sebanyak 4 ruang lingkup produk HACCP dengan demikian telah terealisasi 100%.
3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam 1 triwulan.

$$X = \frac{A + B}{Xn}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

Xn = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{100 + 100}{2} = \frac{200}{2} = 100 \quad X = 100 \%$$

- ❖ Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Prproduksi Pasca Panen Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 70%
- ❖ Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :
 - a. 1 Sertifikat SKP untuk 1 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Rumput Laut Kering
 - b. 4 Sertifikat HACCP untuk 3 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Ikan Kering dan Ikan Segar, Udang segar, dan Ikan Demersal segar.
- ❖ Ruang Lingkup Sertifikasi SKP Triwulan I Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1	Yayasan Nusatenggara Vokasi	Rumput Laut Kering	B	35136/53/SKP/KR/I/2025 6 Januari 2025

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP Triwulan I Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1	UD. Bunga Lontar	Dried Fish	C	218/PM/HACCP/PK/02/25 29 Februari 2025
2	CV. Elitism	Fresh Grouper	C	066/PM/HACCP/PS/03/25 06 Maret 2025
3.	CV. Elitism	Fresh Shrimp	C	067/PM/HACCP/PS/03/25 06 Maret 2025
4.	PT. Onedegreefish Indonesia Maumere	Frozen Pelagic Fish	B	481/PM/HACCP/PB/03/25 29 Maret 2025

❖ Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan rician sebagai berikut :

1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Rp.30.000.000,-
2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar Rp. 35.000.000,-
3. Sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP Ruang Lingkup Produk pada Unit Pengolahan Ikan Rp. 35.000.000,

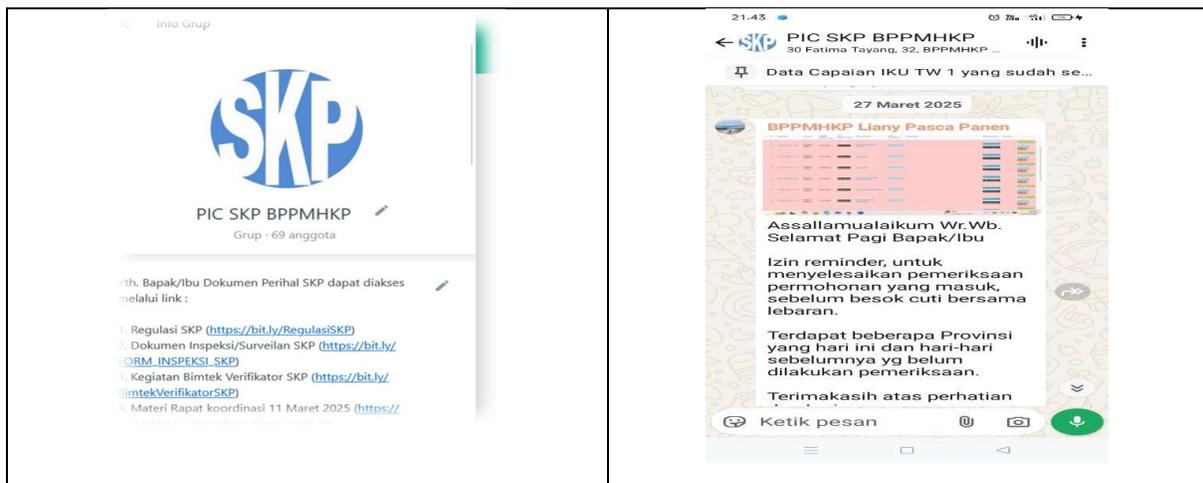
❖ Realisasi Anggaran pada kegiatan Produksi Pasca Panen pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.3.932.500,- atau 3,93%dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sertifikasi SPDI	30.000.000	-	30.000.000
2.	Sertifikasi SKP	35.000.000	600.000	34.600.000
3.	Sertifikasi PMMT / HACCP	35.000.000	3.332.500	31.667.500
	Jumlah	100.000.000	3.932.500	68.332.500

❖ Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan verifikasi SKP dan Inpeksi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu / HACCP adalah sebanyak 5 orang Inspektur Mutu dari Stasiun KIPM Kupang.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- ❖ Inspektur Mutu mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Petugas UPT & Pusat dalam rangka sertifikasi SKP dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat Mutu Pascapanen. Peserta yang bergabung melalui zoom meeting sebanyak 226 orang yang berasal dari inspektur mutu lingkup Badan PPMHKP.
- ❖ Melakukan komunikasi dengan antara petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui *whats up group PIC SKP BPPMHKP* untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



- ❖ Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam *whats up group HACCP UPI NTT* untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP)	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait refreshment / bimtek HACCP, SKP, SPDI untuk Inspektur Mutu	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025

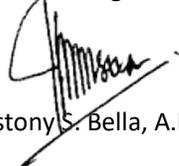
Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S. St. Pi



Kupang, 10 April 2025
Ketua Tim Pengendalian Mutu



Prinestony S. Bella, A. Pi

Lampiran 1.

**TABEL CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI SERTIFIKAT KELAYAKAN
PENGOLAHAN DI UNIT PENGOLAHAN IKAN**

TRIWULAN I 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Sertifikat SKP	%
1.	Stasiun KIPM Kupang	70	1	1	100

TABEL CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI PENERAPAN HACCP

DI UNIT PENGOLAHAN IKAN

TRIWULAN I 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Permohonan	Jumlah Sertifikat HACCP	%
1.	Stasiun KIPM Kupang	70	4	4	100

INSPEKSI PENAMBAHAN RUANG LINGKUP HACCP
DI CV. ELITISM
2025



**INSPEKSI ONLINE PENAMBAHAN RUANG LINGKUP HACCP
DI UPI PT. ONEDEGREEFISH INDONESIA MAUMERE
2025**



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG

Nama Indikator : Rasio Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

Nama Timja : Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan : Triwulan I Tahun 2025

NAMA SASARAN STRATEGIS	:	Program Nilai Tambah Daya Saing Ekspor
NAMA IK	:	Rasio Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

T/R	TAHUN						Capaian TAHUN 2025
	Q1	Q2	SM.I	Q3	Q4	SM.II	
Target	99	0	0	0	0	0	0
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0
% Capaian	101,01	0	0	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1,2,3,4

SM.I = Capaian Semester I

SM.II = Capaian Semester II

Tahunan = Capaian Akhir Tahun

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP. Kewajiban melengkapi SMKHP sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia untuk tujuan :
 - a. konsumsi; dan
 - b. nonkonsumsi.
- ❖ SMKHP untuk Hasil Perikanan konsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:
 1. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
 2. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
 3. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.
- ❖ SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan.
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi

sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

- ❖ **Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** yang selanjutnya disingkat **SMKHP** adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.H)
- ❖ Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMHKP terdiri dari beberapa jenis / model dengan negara tujuan yang berbeda antara :
 - ❖ SMKHP untuk Non Negara Mitra (Model H); contoh : Singapura, Timor Leste, Australia dan Malaysia;
 - ❖ SMKHP untuk Negara Mitra (Model A,B,C,D,E,F dan G) merupakan jenis SMKHP yang telah disepakai oleh negara tujuan sesuai bentuk dan isinya; Contoh : USA, Uni Eropa, Inggris, China, Korea, Vietnam.
- ❖ Pada Triwulan I tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi SMHKP antara lain:
 - a. Sertifikat SMHKP ke Negara Mitra;
 - b. Sertifikat SMKHP ke Negara Non Mitra;

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target (jika tidak tercapai Akar Masalah, Mengapa hal tersebut terjadi?)

- ❖ Capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor diperoleh dari Jumlah SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP dikurangi dengan Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan dan diperbandingkan dengan jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan ekspor.

A - B

$$X = \frac{A - B}{A} \times 100 \%$$

X = Rasio Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor (%)
 A = SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP
 B = Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan

$$X = \frac{156 - 0}{156} = \frac{156}{156} \times 100\% = 100 \%$$

- ❖ Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan yang diterima negara tujuan Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 70% karena tidak ada penolakan terhadap SMKHP atau Hasil Perikanan yang diekspor
- ❖ Output dari kegiatan Sertifikasi SMKHP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :
 - a. 1 Sertifikat SMKHP Model A untuk Unit Usaha Pengolahan Ikan yang mengekspor ke Negara Mitra yaitu Korea berupa Ikan Asap;
 - b. 155 Sertifikat SMKHP Model H untuk negara Non Mitra yang mengirim ke negara Timor Leste, Singapura, Australia dan Jerman berupa Ikan Demersal Segar, Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal segar, Ikan Kering dan Powder Rumput Laut.
- ❖ Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan rician sebagai berikut :
 1. Evaluasi Penerbitan HC di UPI Rp.10.000.000,-
- ❖ Realisasi Anggaran pada kegiatan Evaluasi penerbitan HC (SMKHP) pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,- hal ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran.

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Evaluasi Penerbitan SMHKP	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah	10.000.000	0	10.000.000

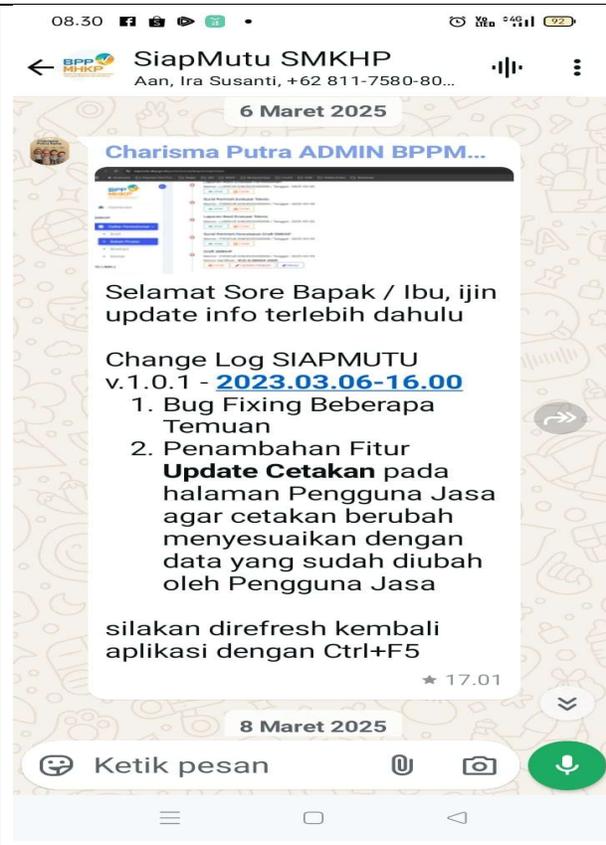
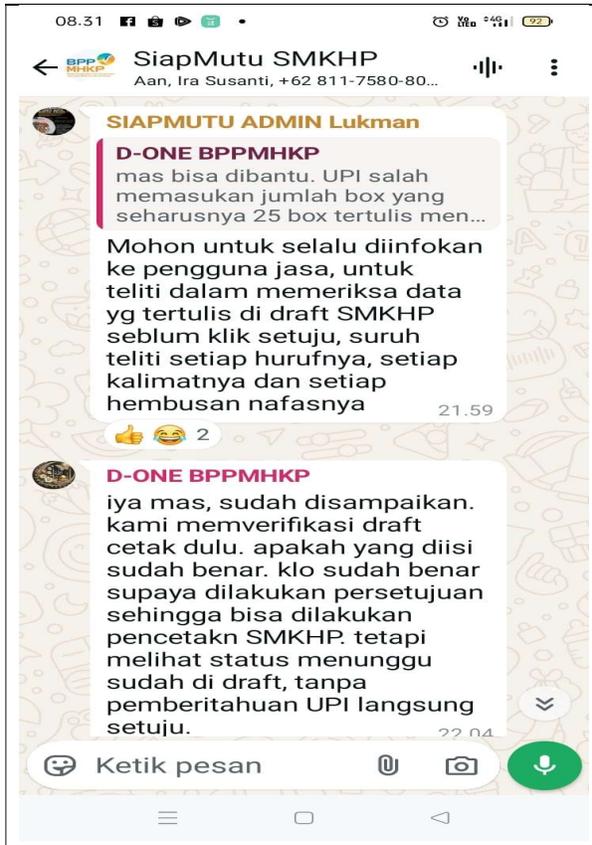
- ❖ Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan Evaluasi Penerbitan SMKHP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu, 1 Orang Asisten Inpektur Mutu dan 4 ornag tenaga administrasi perkantoran dari Stasiun KIPM Kupang.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- ❖ Pada 22 Januari 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan Sosialisasi terkait Sertifikasi SMKHP dan Penarikan PNBP yang berlaku di UPT BPPMHKP. Dihadiri oleh Tim Inspektur Mutu SKIPM Kupang dan Para Pelaku Usaha Ekspor Hasil Perikanan perseorangan maupun perusahaan sejumlah 30 Orang di Ruang Rapat Stasiun KIPM Kupang.



❖ Verifikator SMKHP UPT / Inspektur Mutu melakukan koordinasi terkait aplikasi Siapmutu SMKHP dengan Administrator SMKHP Badan PPMHKP melalui Whats up group **SiapMutu SMKHP**.



H 006164

THE REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
CERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Consignee / Penerima: Name / Nama: CV KURNIA FISHERY Address / Alamat: Pelabuhan Perikanan Teranu RT 007 RW 002, Kel. Akak, Kec. Akak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia		Competent Authority / Otoritas Kompeten: MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFMQA) Certifying Body / Instalasi Penerbit Sertifikat: Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency Kupang	
3. Origin Country of raw Material / Negara Asal Bahan Baku: Indonesia		4. Country of Destination / Negara Tujuan: Singapore	
5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengelantaran (pelabuhan): CENKANGENDI / BODEKANGO HATA		6. Port of destination / Pelabuhan tujuan: SINGAPORE	
7. Means of transport / Alat transportasi: Aeroplane / Pesawat		8. Transport condition / Kondisi transportasi: March 15, 2025	
9. Identification of transport / Identitas alat transportasi: Name of transportation / Nama alat transportasi: AIRPLANE Registration Number / Nomor alat transportasi: AIRPLANE		10. Date of departure / Tanggal pengangkatan: March 15, 2025	
11. Intended uses of the product / Tujuan penggunaan product: Human consumption / Konsumsi manusia		12. Source of raw material / Sumber bahan baku: Wild-Caught / Tangkap	
13. Producing Establishment / Unit usaha: Name / Nama: CV KURNIA FISHERY Address / Alamat: Pelabuhan Perikanan Teranu RT 007 RW 002, Kel. Akak, Kec. Akak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha: 634PMHAKCP000204		14. Total Weight (kg) / Jumlah berat (kg): 300 Kg 15. Total number and type of Packages / Jumlah dan jenis kemasan: 10 Box 16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal:	

No.	Produk/Description Produk	Country and Identifier Name Nama unit dan Identifikasi	Volume (kg) / (liter) Volume (kg) / (liter)	Number of packages Jumlah kemasan	Type of packages Jenis Kemasan	Batch number Nomor Batch	Date of production Tanggal produksi
1	FRESH KING FISH	FRESH KING FISH / SKELETONLESS SKINNED	300	10	Box	20250340111	2025-03-14

Attestation / Pernyataan

The undersigned Certifying Official certifies that the products described above satisfy the following requirements/ Pejabat penerbit sertifikat ini menyatakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut:

a. The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority. Produk telah diproses, diperiksa dan dinilai di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten.

b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements set down in the Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003). Setiap tahapan, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan diangkut dengan menerapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kode Praktek (CAC/RCP 52-2003).

QR CODE

Signature of the Official Inspector Mutu: HISTORY SAFARIKUS BELLA, A.P.

A 19 0004209

THE REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
HEALTH CERTIFICATE OF FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT KESEHATAN HASIL PERIKANAN

Reference: 27 B. 0001 - 2025

COUNTRY OF DISPATCH: THE REPUBLIC OF INDONESIA
COMPETENT AUTHORITY: THE QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (PQA)
INSPECTION AGENCY: REGIONAL FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (QIA) KUPANG

1. PRODUCT IDENTIFICATION: IDENTIFIKASI PRODUK

A. PRODUCT DESCRIPTIONS / DESKRIPSI PRODUK: KATUBUNGHU

B. SPECIES / SPESIES: KALAMUNUS PAMPHI

C. DRIED SMOKED FISH BKP JACK

D. NET WEIGHT / BERAT BERSIH: 400 Cation

E. GROSS WEIGHT / BERAT BERSIH: 1300 KG

F. ORIGIN / ASAL: PT. OREDE GREEN FISH INDONESIA MAUMERE di Danau Teluk Paksi, Kec. Paksi Barat, Kabupaten Eka, East Nusa Tenggara

G. MANUFACTURE DATE / TANGGAL PRODUKSI: 22 - 11

II. DESTINATION OF PRODUCT: TUJUAN PRODUK

1. The origin products are to be dispatched from Tanjung Pagar, Surabaya, Indonesia
Produk Perikanan dikirim dari: Imbabu, Pone (Dulu) ID

2. Back following means of transport Dengan menggunakan cara transportasi: Kapal

3. Temperature, handling, storage and transportation conditions telah ditetapkan persyaratan dan transportasi: 15°C

4. Name and Address of Consignee Nama dan Alamat Penerima: PT. REALTECH INC 20 PETERBORO PAI, BANGSUNGUO DA, KABUPATEN OF KOREA ZIP CODE: 1000

IV. ATTESTATION / PERNYATAAN

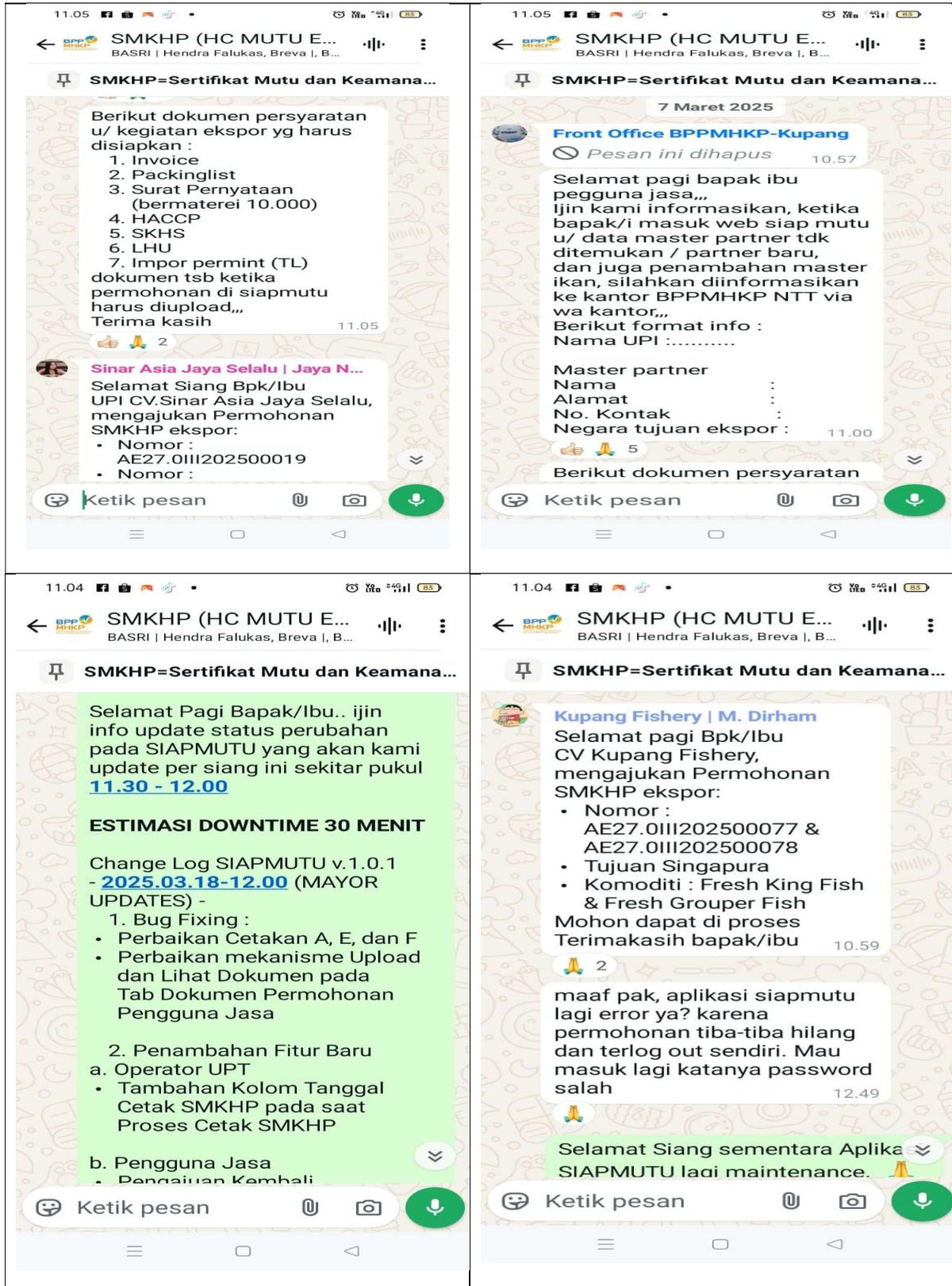
1. The products described above originate from one approved establishment (s) and Produk yang diuraikan diatas berasal dari unit pengelahan dan yang sudah diakui dan

2. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a HACCP Based Integrated Quality Management Program, consistently implemented in accordance with the requirements telah disiapkan, disiapkan, diolah, diidentifikasi, disimpan dan diangkut dengan berdasarkan program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan HACCP yang telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan persyaratan.

Date / Ditandatangani: Kupang On / Pada: January 03, 2025

Signature of the Official Inspector Mutu: Achmad Effendi, S.Pi

- ❖ Melakukan komunikasi dengan antara petugas Verifikasi permohonan SMKHP dengan Pengguna Jasa / Pelaku Usaha melalui *whats up group SMKHP (HC Mutu Ekspor)* terkait permohonan, sertifikasi SMKHP dan permasalahan dalam aplikasi Siapmutu SMKHP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Tim Verifikator SMKHP lingkup Stasiun KIPM Kupang	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Administrator Pusat terkait aplikasi Siapmutu SMKHP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi SMKHP	Timja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Triwulan 2,3,4 Tahun 2025



Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang

Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 10 April 2025
Ketua Tim Pengendalian Mutu

Prinstony S. Bella, A.Pi

Lampiran 1.

**TABEL CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI SMKHP
LINGKUP SMKHP KUPANG
TRIWULAN I 2025**

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah SMKHP Terbit	Jumlah SMKHP ditolak Negara	%
1.	Stasiun KIPM Kupang	70	156	157	100

**TABEL SERTIFIKASI PENERBITAN SMKHP
LINGKUP SKIPM KUPANG
TRIWULAN I 2025**

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah SMKHP Terbit	Jumlah Penolakan Negara Tujuan	%
			A	B	X
1.	Januari	53	53	0	100
2.	Pebruari	39	39	0	100
3.	Maret	64	64	0	100
Jumlah		156	156	0	100

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan 1 Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	85								
Realisasi	100								
% Capaian	117,65								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

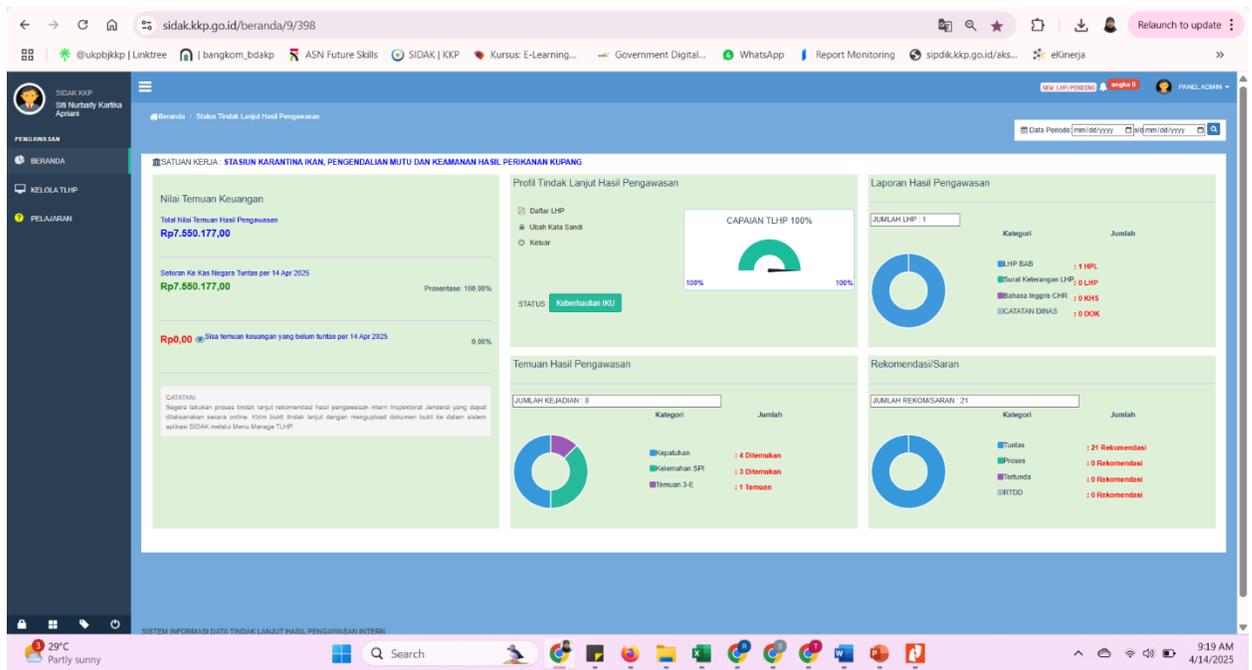
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 100% (sesuai *screenshot dashboard* SIDAK KKP) dari target pada Triwulan I sebesar 85%. Capaian Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang ini diperoleh dari data SIDAK KKP, berdasarkan penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dari Audit Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024. Penyelesaian LHP Sudah diselesaikan hingga 100%.



screenshoot dashboard SIDAK KKP

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S.St.Pi



Kupang, 14 April 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajeria



Siti Nurbaity Kartika Apriani

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan 1 Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN						Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II		
Target	76							
Realisasi	100							
% Capaian	120,00							

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4= Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang

Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target pada Triwulan I sebesar 76%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa
 Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 :

$$\frac{58,810,000}{58,810,000} \times 100\% = 100\%$$

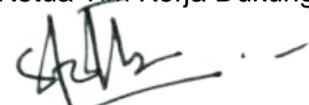
Nilai Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP yang tertera pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro PBJ KKP

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
6	STASIUN KIPMHKP PADANG	1,695,668,000	951,373,000	744,295,000	0	744,295,000	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	1,536,305,000	848,465,000	687,840,000	0	687,840,000	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	2,858,459,000	1,368,402,000	1,490,057,000	0	1,490,057,000	100.00%
9	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	1,110,080,000	669,643,000	440,437,000	0	440,437,000	100.00%
10	BALAI KIPMHKP MANADO	3,933,678,000	2,221,985,000	1,711,693,000	0	1,711,693,000	100.00%
11	STASIUN KIPMHKP KENDARI	656,543,000	305,302,000	351,241,000	0	351,241,000	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,734,377,000	651,863,000	1,082,514,000	0	1,082,514,000	100.00%
13	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	1,550,045,000	1,150,895,000	399,150,000	0	399,150,000	100.00%
14	STASIUN KIPMHKP MAMULILU	103,423,000	68,423,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00%
15	STASIUN KIPMHKP KUPANG	989,490,000	930,680,000	58,810,000	0	58,810,000	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,914,801,000	879,807,000	1,035,194,000	0	1,035,194,000	100.00%
17	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	1,493,827,000	928,664,000	565,163,000	0	565,163,000	100.00%
18	STASIUN KIPMHKP PALU	454,470,000	420,370,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	1,174,326,000	737,555,000	436,771,000	0	436,771,000	100.00%
20	STASIUN KIPMHKP JAMBI	430,007,000	137,403,100	173,413,900	0	173,413,900	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	1,118,531,000	453,628,000	664,903,000	0	664,903,000	100.00%

Mengetahui
 Kepala Stasiun KIPM Kupang

 Ridwan S St.Pi



Kupang, 14 April 2025
 Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

 Siti Nurbaity Kartika Apriani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang berdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran
 Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025
 Tanggal : 14 April 2025

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	0	3,074,204,000	100.00%
TOTAL		12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	-	3,074,204,000	100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PKRL	261,203,332,000	104,939,270,000	156,264,062,000	0	156,264,062,000	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	3,393,333,000	672,730,000	2,720,603,000	0	2,720,603,000	100.00%
3	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	6,375,019,000	3,458,788,000	2,916,231,000	0	2,916,231,000	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	3,431,580,000	1,088,252,000	2,343,328,000	0	2,343,328,000	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,995,766,000	5,319,309,000	14,676,457,000	0	14,676,457,000	100.00%
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	6,830,966,000	1,496,560,000	5,334,406,000	0	5,334,406,000	100.00%
7	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	34,247,947,000	7,929,570,000	26,318,377,000	0	26,318,377,000	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	4,620,954,000	1,558,667,000	3,062,287,000	0	3,062,287,000	100.00%
9	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	25,399,451,000	6,130,465,000	19,268,986,000	0	19,268,986,000	100.00%
TOTAL		365,498,348,000	132,593,611,000	232,904,737,000	-	232,904,737,000	100.00%

📌 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PDSPKP	115,520,273,000	92,739,078,000	22,781,195,000	0	22,781,195,000	100.0000%
2	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	17,620,174,000	10,340,223,000	7,279,951,000	0	7,279,951,000	100.0000%
TOTAL		133,140,447,000	103,079,301,000	30,061,146,000	-	30,061,146,000	100.00%

📌 Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,747,944,000	1,244,617,000	3,503,327,000	0	3,503,327,000	100.0000%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	374,429,658,813	240,440,159,813	133,989,499,000	0	133,989,499,000	100.0000%
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17,192,748,000	13,487,217,000	3,705,531,000	0	3,705,531,000	100.0000%
TOTAL		396,370,350,813	255,171,993,813	141,198,357,000	-	141,198,357,000	100.00%

 **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	58,884,712,000	31,737,714,000	27,146,998,000	-	27,146,998,000	100.0000%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	22,397,487,000	10,811,525,000	11,611,482,000	-	11,611,482,000	100.0000%
3	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	10,478,712,000	5,480,294,000	4,998,418,000	-	4,998,418,000	100.0000%
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	15,964,411,000	7,870,111,000	8,094,300,000	-	8,094,300,000	100.0000%
5	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	15,435,966,000	7,386,800,000	8,049,166,000	-	8,049,166,000	100.0000%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	10,922,447,000	5,112,980,000	5,809,467,000	-	5,809,467,000	100.0000%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	13,079,571,000	5,664,854,000	7,414,717,000	-	7,414,717,000	100.0000%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	4,664,595,000	2,736,731,000	1,927,864,000	-	1,927,864,000	100.0000%
9	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	5,053,928,000	2,164,272,000	2,889,656,000	-	2,889,656,000	100.0000%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	10,127,563,000	4,966,733,000	5,160,830,000	-	5,160,830,000	100.0000%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,469,004,000	4,613,193,000	4,855,811,000	-	4,855,811,000	100.0000%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	6,938,438,000	4,125,531,000	2,812,907,000	-	2,812,907,000	100.0000%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	11,918,263,000	5,179,650,000	6,738,613,000	-	6,738,613,000	100.0000%
14	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	3,248,807,459	4,075,755,541	-	4,075,755,541	100.0000%
15	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	554,406,885,000	187,773,216,000	366,633,669,000	-	366,633,669,000	100.0000%
16	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	11,579,998,000	5,728,781,000	5,851,217,000	-	5,851,217,000	100.0000%
	TOTAL	768,646,543,000	294,601,192,459	474,070,870,541	-	474,070,870,541	100.00%

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,852,355,000	3,602,011,000	3,250,344,000	0	3,250,344,000	100.00%
2	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,734,269,000	766,079,000	968,190,000	0	968,190,000	100.00%
3	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,380,044,000	510,142,000	869,902,000	0	869,902,000	100.00%
4	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,713,372,000	945,404,000	1,767,968,000	0	1,767,968,000	100.00%
5	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	5,195,890,000	2,077,925,000	3,117,965,000	0	3,117,965,000	100.00%
6	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,884,926,000	2,455,714,000	4,429,212,000	0	4,429,212,000	100.00%
7	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	5,027,470,000	2,990,213,000	2,037,257,000	0	2,037,257,000	100.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	3,699,357,000	1,360,567,000	2,338,790,000	0	2,338,790,000	100.00%
9	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	8,172,722,000	2,874,033,000	5,298,689,000	0	5,298,689,000	100.00%
10	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	12,977,451,000	7,284,745,000	5,692,706,000	0	5,692,706,000	100.00%
11	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3,090,000,000	1,666,257,000	1,423,743,000	0	1,423,743,000	100.00%
12	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,871,421,000	3,366,137,000	2,505,284,000	0	2,505,284,000	100.00%
13	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	10,351,733,000	8,974,145,000	1,377,588,000	0	1,377,588,000	100.00%
14	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15,645,586,000	7,968,044,000	7,677,542,000	0	7,677,542,000	100.00%
15	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	5,353,114,000	3,899,339,000	1,453,775,000	0	1,453,775,000	100.00%
16	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	12,180,958,000	10,520,456,000	1,660,502,000	0	1,660,502,000	100.00%
17	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	11,198,948,000	9,407,506,000	1,791,442,000	0	1,791,442,000	100.00%
18	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	4,894,433,000	3,558,327,000	1,336,106,000	0	1,336,106,000	100.00%
19	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	6,430,703,000	5,176,541,000	1,254,162,000	0	1,254,162,000	100.00%
20	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	27,934,979,000	13,535,768,000	14,399,211,000	0	14,399,211,000	100.00%
21	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	17,719,192,000	8,500,585,000	9,218,607,000	0	9,218,607,000	100.00%
22	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	6,417,426,000	5,522,634,000	894,792,000	0	894,792,000	100.00%
23	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,483,764,000	3,178,854,000	2,304,910,000	0	2,304,910,000	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	31,989,836,000	3,614,574,356	28,375,261,644	0	28,375,261,644	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	6,682,838,000	4,489,408,476	2,193,429,524	0	2,193,429,524	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	9,773,786,000	6,837,572,000	2,936,214,000	0	2,936,214,000	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	1,706,542,000	546,606,000	1,159,936,000	0	1,159,936,000	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,581,387,000	567,902,000	1,013,485,000	0	1,013,485,000	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	4,037,436,000	2,328,361,000	1,669,707,000	0	1,669,707,000	100.00%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	4,422,804,000	3,318,442,000	1,104,362,000	0	1,104,362,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	4,834,550,000	2,324,153,000	2,510,397,000	0	2,510,397,000	100.00%
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	4,749,473,000	2,935,453,000	1,814,020,000	0	1,814,020,000	100.00%
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	4,516,869,000	3,401,264,000	1,115,605,000	0	1,115,605,000	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,224,694,000	602,519,000	622,175,000	0	622,175,000	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	3,963,035,000	2,414,682,000	1,548,353,000	0	1,548,353,000	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,722,184,000	1,132,576,000	589,608,000	0	589,608,000	100.00%
37	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1,776,770,000	780,782,000	995,988,000	0	995,988,000	100.00%
38	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	2,457,443,000	1,990,062,000	482,887,000	0	482,887,000	100.00%
39	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDMPK	37,408,305,000	21,099,518,000	16,308,787,000	0	16,308,787,000	100.00%
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	21,424,278,000	13,277,404,000	8,146,874,000	0	8,146,874,000	100.00%
41	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,793,500,000	2,050,631,000	1,742,869,000	0	1,742,869,000	100.00%
	TOTAL	340,775,885,000	186,450,572,832	154,301,450,168	-	154,301,450,168	100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	18,936,169,000	11,650,004,000	7,286,165,000	0	7,286,165,000	100.00%
2	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,984,790,000	11,649,012,000	5,385,164,000	0	5,385,164,000	100.00%
3	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	19,957,494,000	11,785,669,000	8,171,825,000	0	8,171,825,000	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	24,383,171,000	10,392,543,000	13,990,628,000	0	13,990,628,000	100.00%
5	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	8,828,253,000	4,830,075,000	3,998,178,000	0	3,998,178,000	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	22,623,261,000	16,093,548,000	6,529,713,000	0	6,529,713,000	100.00%
7	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,571,856,000	4,963,934,000	3,607,922,000	0	3,607,922,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	10,673,580,000	6,260,613,000	4,412,967,000	0	4,412,967,000	100.00%
9	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	18,995,926,000	13,172,220,000	5,823,706,000	0	5,823,706,000	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	11,368,638,000	8,336,319,000	3,032,319,000	0	3,032,319,000	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	10,548,291,000	6,522,652,000	4,025,639,000	0	4,025,639,000	100.00%
12	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	21,481,831,000	12,683,680,000	8,798,151,000	0	8,798,151,000	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	8,394,285,000	5,146,180,000	3,248,105,000	0	3,248,105,000	100.00%
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	291,951,995,000	216,367,404,000	75,584,591,000	0	75,584,591,000	100.00%
15	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	24,072,394,000	16,304,328,000	7,768,066,000	117,745,000	7,885,811,000	101.52%
TOTAL		517,771,934,000	356,158,181,000	161,663,139,000	117,745,000	161,780,884,000	100.07%

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	6,552,158,000	2,941,461,000	3,610,697,000	0	3,610,697,000	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	65,696,049,000	5,508,508,000	60,187,541,000	0	60,187,541,000	100.00%
3	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	6,403,317,000	3,276,664,000	3,126,653,000	0	3,126,653,000	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	4,920,264,000	3,099,917,000	1,820,347,000	0	1,820,347,000	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,715,487,000	703,996,000	3,011,491,000	0	3,011,491,000	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	3,094,308,000	1,357,979,000	1,736,329,000	0	1,736,329,000	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	3,609,688,000	1,986,038,000	1,623,650,000	0	1,623,650,000	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,532,560,000	3,463,651,000	58,068,909,000	0	58,068,909,000	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,976,153,000	1,558,921,000	1,417,232,000	0	1,417,232,000	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	6,497,602,000	3,301,931,000	3,195,671,000	0	3,195,671,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,817,270,000	1,582,763,000	2,234,507,000	0	2,234,507,000	100.00%
12	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	301,142,412,000	81,549,421,000	219,592,991,000	0	219,592,991,000	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,367,671,000	3,959,325,000	2,408,346,000	0	2,408,346,000	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBANGAN	260,214,908,000	3,727,756,000	256,487,152,000	0	256,487,152,000	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	5,691,813,000	2,885,497,000	2,806,316,000	0	2,806,316,000	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	40,131,847,000	5,582,775,000	34,549,072,000	0	34,549,072,000	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	4,741,886,000	3,397,358,000	1,344,528,000	0	1,344,528,000	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	5,016,456,000	3,801,293,000	1,215,163,000	0	1,215,163,000	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,285,054,000	1,787,024,000	6,498,030,000	0	6,498,030,000	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4,080,248,000	2,147,780,000	1,932,468,000	0	1,932,468,000	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,263,656,000	2,516,166,200	3,747,489,800	0	3,747,489,800	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	5,351,273,000	2,473,815,000	2,877,458,000	1,125,582,000	4,003,040,000	139.12%
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	5,110,199,000	2,895,155,112	2,215,043,888	(116,240,888)	2,098,803,000	94.75%
24	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	30,796,027,000	18,028,494,000	12,767,533,000	(2,609,427,000)	10,158,106,000	79.56%
	TOTAL	852,008,306,000	163,533,688,312	688,474,617,688	(1,600,085,888)	686,874,531,800	99.77%

✚ Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI KIPMHKP SURABAYA I	7,333,862,000	2,731,893,000	4,601,969,000	0	4,601,969,000	100.00%
2	BALAI KIPMHKP MEDAN I	3,610,142,000	1,382,357,000	2,227,785,000	0	2,227,785,000	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHKP MAKASSAR	4,273,547,000	2,159,240,000	2,114,307,000	0	2,114,307,000	100.00%
4	BALAI KIPMHKP DENPASAR	2,823,538,000	1,039,528,000	1,784,010,000	0	1,784,010,000	100.00%
5	STASIUN KIPMHKP BATAM	2,247,622,000	896,360,302	1,351,261,698	0	1,351,261,698	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
6	STASIUN KIPMHKP PADANG	1,695,668,000	951,373,000	744,295,000	0	744,295,000	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	1,536,305,000	848,465,000	687,840,000	0	687,840,000	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	2,858,459,000	1,368,402,000	1,490,057,000	0	1,490,057,000	100.00%
9	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	1,110,080,000	669,643,000	440,437,000	0	440,437,000	100.00%
10	BALAI KIPMHKP MANADO	3,933,678,000	2,221,985,000	1,711,693,000	0	1,711,693,000	100.00%
11	STASIUN KIPMHKP KENDARI	656,543,000	305,302,000	351,241,000	0	351,241,000	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,734,377,000	651,863,000	1,082,514,000	0	1,082,514,000	100.00%
13	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	1,550,045,000	1,150,895,000	399,150,000	0	399,150,000	100.00%
14	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	103,423,000	68,423,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00%
15	STASIUN KIPMHKP KUPANG	989,490,000	930,680,000	58,810,000	0	58,810,000	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,914,801,000	879,607,000	1,035,194,000	0	1,035,194,000	100.00%
17	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	1,493,827,000	928,664,000	565,163,000	0	565,163,000	100.00%
18	STASIUN KIPMHKP PALU	454,470,000	420,370,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	1,174,326,000	737,555,000	436,771,000	0	436,771,000	100.00%
20	STASIUN KIPMHKP JAMBI	430,007,000	137,403,100	173,413,900	0	173,413,900	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	1,118,531,000	453,628,000	664,903,000	0	664,903,000	100.00%
22	BALAI KIPMHKP SEMARANG	2,236,942,000	1,046,512,000	1,190,430,000	0	1,190,430,000	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP GORONTALO	910,816,000	684,050,000	226,766,000	0	226,766,000	100.00%
24	BALAI KIPMHKP JAKARTA II	2,858,688,000	1,001,469,000	1,857,219,000	0	1,857,219,000	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP MERAK	1,654,275,000	995,923,000	658,352,000	0	658,352,000	100.00%
26	STASIUN KIPMHKP PANGKAL PINANG	1,871,554,000	864,822,000	1,006,732,000	0	1,006,732,000	100.00%
27	STASIUN KIPMHKP MERAUKE	1,566,920,000	798,865,000	768,055,000	0	768,055,000	100.00%
28	STASIUN KIPMHKP SORONG	556,662,000	217,925,000	338,737,000	0	338,737,000	100.00%
29	STASIUN KIPMHKP YOGYAKARTA	1,414,763,000	604,480,000	810,283,000	0	810,283,000	100.00%
30	STASIUN KIPMHKP CIREBON	2,929,266,000	1,306,538,000	1,622,728,000	0	1,622,728,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHKP AMBON	1,659,694,000	1,031,308,000	628,386,000	0	628,386,000	100.00%
32	STASIUN KIPMHKP TERNATE	429,629,000	316,664,000	112,965,000	0	112,965,000	100.00%
33	BALAI UJI STANDAR KIPMHKP	6,408,384,000	3,693,415,000	2,714,969,000	0	2,714,969,000	100.00%
34	BALAI KIPMHKP TARAKAN	1,645,435,000	1,490,679,200	154,755,800	0	154,755,800	100.00%
35	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	2,140,551,000	1,748,549,000	392,002,000	0	392,002,000	100.00%
36	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	1,470,733,574	525,392,250	945,341,324	0	945,341,324	100.00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	44,427,679,000	37,526,741,000	6,900,938,000	397,042,000	7,297,980,000	105.75%
	TOTAL	117,224,732,574	74,786,968,852	42,318,573,722	397,042,000	42,715,615,722	100.94%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan 1 Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	88								
Realisasi	90,87								
% Capaian	103,26								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 90,87 (laporan terlampir) dari target pada Triwulan I sebesar 88. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang ini diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90,87. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu penyelesaian, Kompetensi pelayanan dan Sarana prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Biaya/tarif, Sistem Mekanisme dan prosedur, dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Detail Nilai SKM per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,65	3,67	3,57	3,68	3,65	3,60	3,62	3,65	3,62
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,87 (A atau Sangat Baik)								

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Untuk Peningkatan Nilai Unsur Waktu Penyelesaian; Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, air minum dan makanan ringan, pemberian sanksi kepada petugas pelayanan)	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 2 (April)
Untuk Peningkatan Nilai Unsur Kompetensi Pelayanan; Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan tentang kegiatan pelayanan (Kecepatan pelayanan, kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, pemahaman aplikasi SIAPMUTU dan PNBP)	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 2 (Mei)
Untuk Peningkatan Nilai Unsur Sarana dan Prasarana; Peningkatan perangkat elektronik pendukung pelayanan (komputer, printer, jaringan internet) serta Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 2 (Juni)

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang




Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 14 April 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



Siti Nurbaity Kartika Apriani

LAPORAN

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2025**



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM.....	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 63 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 56 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 63 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	33	69%
		Perempuan	30	63%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	43	90%
		46-60	1	2%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	27	56%
		D3	4	8%
		S1	27	56%
		S2	5	10%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	15	31%
		Pegawai Swasta	13	27%
		Wirusaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%

		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	13	27%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	47	98%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

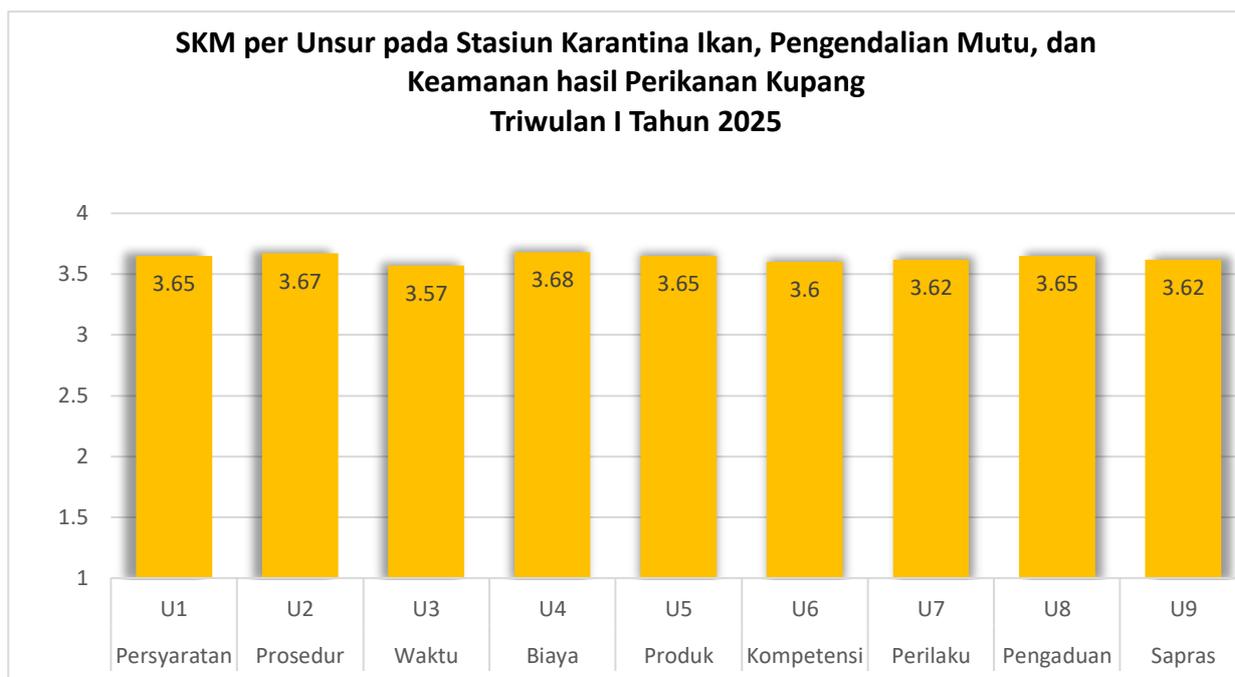
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,65	3,67	3,57	3,68	3,65	3,60	3,62	3,65	3,62
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,87 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,57. Selanjutnya Kompetensi pelayanan mendapatkan nilai 3,62 adalah nilai terendah kedua dan Sarana prasarana yang mendapatkan nilai 3,62 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,68. Selanjutnya Sistem, mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 3,67 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai yaitu 3,65.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Akses aplikasi baru belum stabil”.
- “Lebih baik lagi”.
- “Terbaik. Saling menghargai dan murah senyum itu gratis”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sertifikasi SMKHP menggunakan sistem baru yaitu SIAPMUTU yang belum stabil dan masih banyak kendala di awal penggunaannya sehingga menghambat proses sertifikasi.
- Sarana prasarana pendukung (computer, printer dan internet) dalam pelayanan perlu dilengkapi dengan perangkat yang lebih baik untuk mendukung pelayanan prima.
- Pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPPMHKP yang belum dipahami oleh semua petugas pelayanan sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

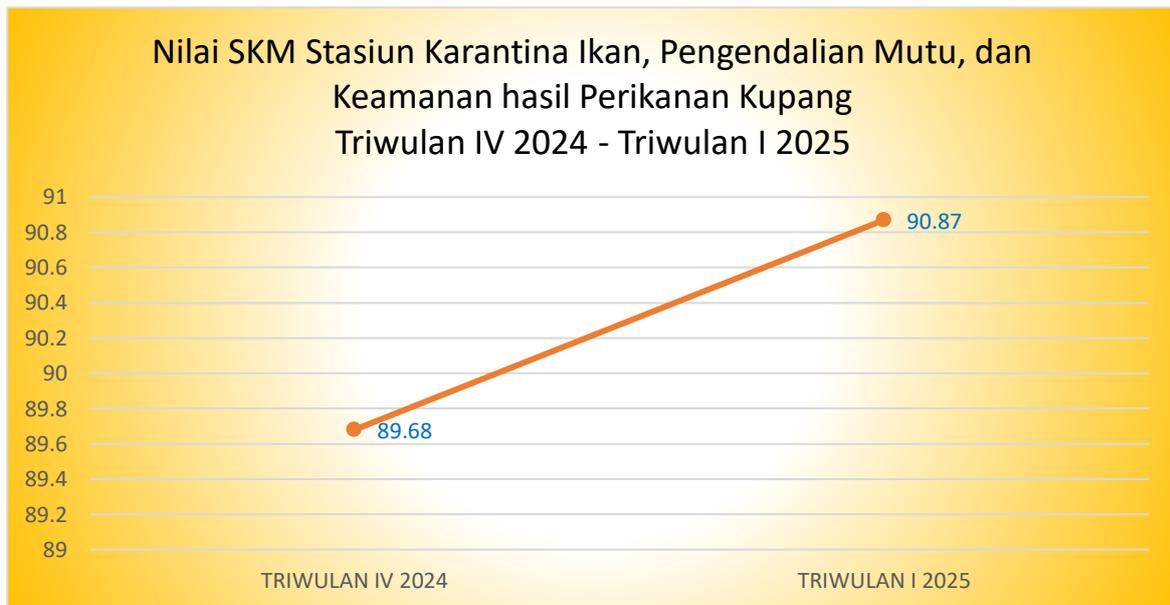
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan yang direncanakan pada bulan Mei 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, air minum dan makanan ringan, pemberian sanksi kepada petugas pelayanan)	√			Tim Pelayanan Publik
2	Kompetensi Pelayanan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan tentang kegiatan pelayanan (Kecepatan pelayanan, kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, pemahaman aplikasi SIAPMUTU dan PNBP)		√		Tim Pelayanan Publik
3	Sarana Prasarana	Peningkatan perangkat elektronik pendukung pelayanan (komputer, printer, jaringan internet) serta Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90,87. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu penyelesaian, Kompetensi pelayanan dan Sarana prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Biaya/tarif, Sistem Mekanisme dan prosedur, dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Kupang, 10 April 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang



Ridwan, S.St.Pi

NIP. 19780725 200502 1 001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

- Perjanjian Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)
- Perjanjian kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (relabel Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)
- Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
- Penerbitan Sertifikat Kebijakan Pengalangan
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
- Penerbitan Sertifikat Cara Penganganan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pemberihan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey: 19-Feb-2025 13:19

Nama:

Jenis Usaha: Perserongan
 Kooperasi

Jenis Kelamin/Gender: Pria/Laki-laki
 Wanita/Perempuan

Usia: < 25 Tahun
 25 s/d 45 Tahun
 46 s/d 60 Tahun
 > 60 Tahun

Pendidikan: SD
 SMP
 SMA
 D3
 S1
 S2
 S3

Pekerjaan: ASN
 TNI/Polri
 Peleku Usaha KIP
 Pegawai Swasta
 Wirasaha Non KIP
 Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah anda/badan hukum/orgenisasi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diurla terja BOPM)

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

Sangat Mudah
 Mudah
 Kurang mudah
 Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

Sangat sesuai
 Sesuai
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

Sangat Cepat
 Cepat
 Kurang cepat
 Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

Sangat Mudah
 Mudah
 Kurang mudah
 Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadukan/indak lanjut)?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kuualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

Sangat baik
 Baik
 Kurang baik
 Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☆☆☆☆☆

Kritik dan Saran: *] Harus diisi minimal 3 kata

*] Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

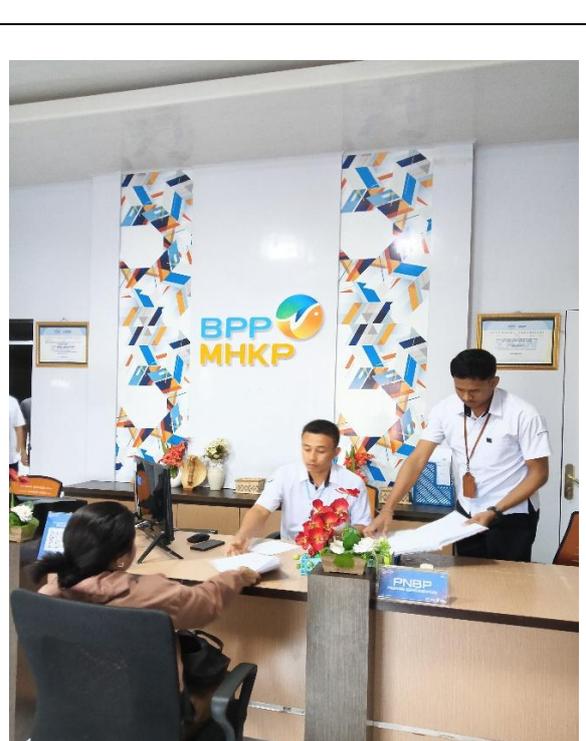
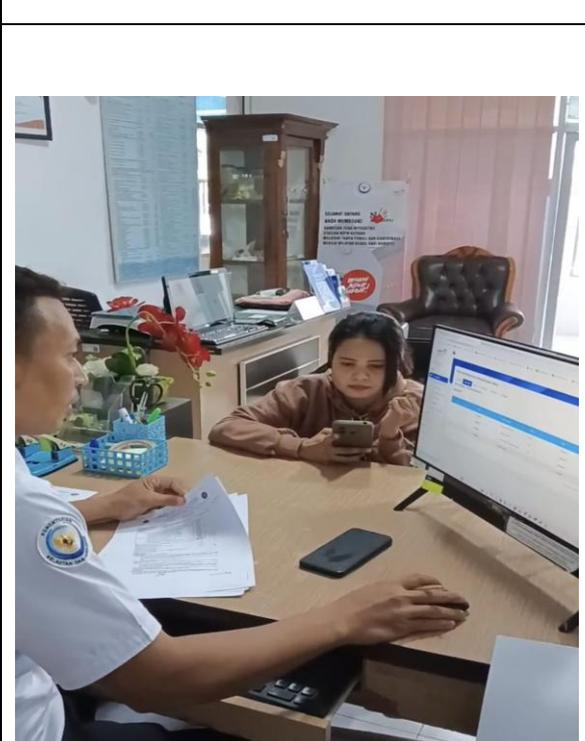
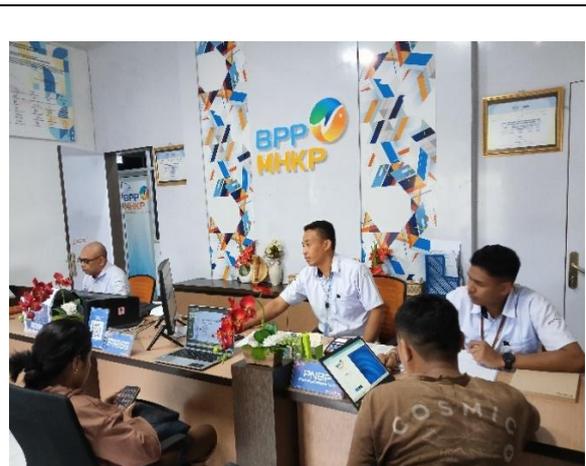
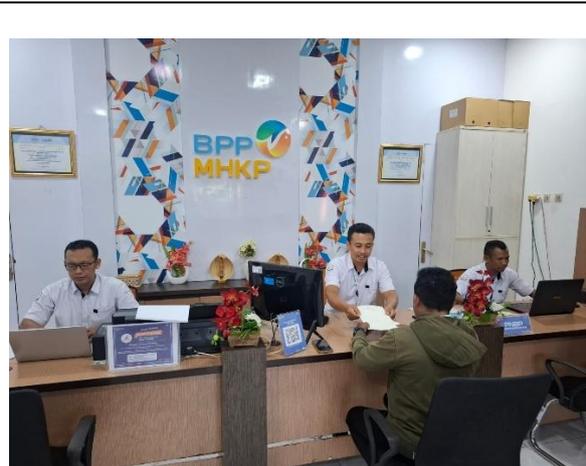
2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG
PERIODE TRIWULAN I 2025

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN		
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Pertahankan pelayanan yang ada.	94.44	94.44	
2	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Perempuan	25-45	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00
3	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	Perempuan	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Mudah Cepet dan Gratis	91.87	
5	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
6	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
7	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	88.89	
8	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
9	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
10	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
11	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
12	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
13	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
14	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
15	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S2	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94.44	
16	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	S1	P.LUKOP	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	88.89	
17	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	D3	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77.78	
18	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
19	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
20	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	D3	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72.22	
21	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
22	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S1	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
23	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S1	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
24	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
25	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
26	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
27	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S2	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94.44	
28	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	87.88
29	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
30	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
31	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
32	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
33	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
34	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
35	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
36	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S2	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94.44	
37	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	D3	anis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72.22	
38	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
39	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
40	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94.44	
41	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
42	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
43	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
44	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
45	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	SMA	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
46	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S2	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94.44	
47	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	<25	S1	pelajar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
48	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	S1	P.LUKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
49	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Perempuan	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
50	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil	Laki-laki	25-45	SMA	swasta	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91.87	
51	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
52	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
53	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
54	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
55	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
56	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
57	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
58	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
59	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
60	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	<25	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
61	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	<25	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
62	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	<25	SMA	wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
63	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	
Jumlah Nilai Per-unsur						230	281	225	232	230	227	228	229	228					
Rata-rata Per-unsur						3.65	3.67	3.57	3.68	3.65	3.60	3.62	3.65	3.62					
Nilai Indeks Per-unsur						0.41	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	0.40					
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat						90.87													
						SANGAT BAIK										96.47			

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	33	69%
		Perempuan	30	63%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	4	8%
		46-60	1	2%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	27	56%
		D3	4	8%
		S1	27	56%
		S2	5	10%
		S3	0	0%
		0	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	15	31%
		dagwal Swasta	13	27%
		Wirusaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
			0	0%
			0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif		

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan IV Tahun 2024**



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Kupang**

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	89,68	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	90,87	A
3	Waktu Penyelesaian	88,48	A
4	Biaya/Tarif	90,48	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	90,08	A
6	Kompetensi Pelaksana	88,10	B
7	Perilaku Pelaksana	90,08	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	89,68	A
9	Sarana dan Prasarana	89,68	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2025)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	
1	U6 Kompetensi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi pada saat morning briefing kepada petugas pelayanan tentang 9 unsur pelayanan. - Melakukan usulan adanya pelatihan eksternal tentang pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi petugas - 			√	Kepala SKIPM Kupang, Tim Pelayanan Publik
2	U3 – Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan tambahan petugas pelayanan penerbitan HC - Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan petugas layanan terkait aturan-aturan baru tentang pelayanan penerbitan HC untuk meminimalisir keterlambatan waktu pelayanan 	√			Kepala SKIPM Kupang, Tim Pelayanan Publik
3	U9 – Sarana prasarana	Mengusulkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada		√		Kepala SKIPM Kupang, Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Sosialisasi pada saat morning briefing kepada petugas pelayanan tentang 9 unsur pelayanan.- Melakukan usulan adanya pelatihan eksternal tentang pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi petugas	Sudah	<p>Melakukan sosialisasi secara langsung setiap briefing pagi ke petugas pelayanan yang di sampaikan oleh kepala UPT, Katimja dan Tim pelayanan publik.</p> <p>Mengikuti pelatihan pelayanan publik yang dilakukan secara daring oleh BPPMHKP</p>		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

					
2	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan tambahan petugas pelayanan penerbitan HC - Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan petugas layanan terkait aturan-aturan baru tentang pelayanan penerbitan HC untuk meminimalisir keterlambatan waktu pelayanan 	Sudah	<p>Melakukan training untuk menambah personal yang bertugas di pelayanan penerbitan SMKHP</p> <p>Melakukan sosialisasi kepana pengguna jasa dan petugas pelayanan yang dilakukan secara langsung dengan mengundang pengguna jasa.</p>		<p>Pengguna jasa cenderung tidak paham dengan system yang baru sehingga informasi yang disampaikan petugas pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang menghambat.</p>

					
3	<p>Mengusulkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada</p>	<p>Sudah</p>	<p>Memperbaiki dan menambah sarana prasarana pendukung (computer dan jaringan internet yang lebih baik) di counter pelayanan</p>		<p>Tidak ada hambatan saat pelaksanaan</p>

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi pada saat morning briefing kepada petugas pelayanan tentang 9 unsur pelayanan. - Melakukan usulan adanya pelatihan eksternal tentang pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi petugas 	<p>Pemberitahuan melalui grup WA kantor dan penyampaian langsung pada saat briefing pagi ke semua petugas pelayanan.</p> <p>Selalu mengikuti pelatihan yang diadakan BPPMHKP serta update informasi terbaru tentang pelayanan</p>	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Petugas pelayanan di lingkup BPPMHKP Kupang

2	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan tambahan petugas pelayanan penerbitan HC - Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan petugas layanan terkait aturan-aturan baru tentang pelayanan penerbitan HC untuk meminimalisir keterlambatan waktu pelayanan 	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait persyaratan layanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Petugas pelayanan Kupang dan Pengguna jasa lingkup di lingkup BPPMHKP Kupang
3	Mengusulkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait perosedur layanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Bagian Tata Usaha dan petugas pelayanan di lingkup BPPMHKP

Kupang, 10 April 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang



Ridwan, S.St.Pi

NIP. 19780725 200502 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 14 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan 1 Tahun 2025 UPP BPPMHKP

Yth. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan 1 tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai "Sangat Baik" melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 3 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu:
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)

- Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:
- Persyaratan (U1) = 3,78
 - Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) = 3,76
 - Waktu Penyelesaian (U3) = 3,74
 - Biaya/ Tarif (U4) = 3,77
 - Produk layanan (U5) = 3,77
 - Kompetensi Pelayanan (U6) = 3,67
 - Perilaku Pelaksana (U7) = 3,69
 - Penanganan Pengaduan (U8) = 3,77
 - Sarana dan Prasarana (U9) = 3,74

Nilai terendah ada pada 3 unsur U6, U7 dan U3. Dalam hal ini U3 dan U9 mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 3,74 namun dengan rincian jumlah rendah per layanan yang lebih banyak (tertanda merah pada tabel rekapitulasi per unsur)

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP
Triwulan I Tahun 2025**

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai
12	Stasiun KIPM Yogyakarta	95.83	A	Sangat Baik	18	Tercapai
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	95.44	A	Sangat Baik	153	Tercapai
14	Stasiun KIPM Merauke	95.11	A	Sangat Baik	25	Tercapai
15	Stasiun KIPM Bandung	94.94	A	Sangat Baik	39	Tercapai
16	Stasiun KIPM Bima	94.68	A	Sangat Baik	12	Tercapai
17	Balai KIPM Semarang	94.67	A	Sangat Baik	73	Tercapai
18	Stasiun KIPM Jambi	94.62	A	Sangat Baik	31	Tercapai
19	Balai KIPM Jayapura	94.61	A	Sangat Baik	17	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palu	94.44	A	Sangat Baik	17	Tercapai
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	94.38	A	Sangat Baik	46	Tercapai
22	Stasiun KIPM Aceh	94.05	A	Sangat Baik	7	Tercapai
23	Stasiun KIPM Cirebon	93.98	A	Sangat Baik	60	Tercapai
24	Stasiun KIPM Bau-Bau	93.92	A	Sangat Baik	21	Tercapai
25	Balai KIPM Entikong	93.75	A	Sangat Baik	16	Tercapai
26	Balai Besar KIPM Makassar	93.39	A	Sangat Baik	197	Tercapai
27	Stasiun KIPM Palembang	93.36	A	Sangat Baik	51	Tercapai

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
28	Balai KIPM Surabaya II	92.86	A	Sangat Baik	107	Tercapai
29	Stasiun KIPM Tahuna	92.59	A	Sangat Baik	3	Tercapai
30	Balai KIPM Manado	92.40	A	Sangat Baik	38	Tercapai
31	Stasiun KIPM Padang	92.28	A	Sangat Baik	9	Tercapai
32	Stasiun KIPM Medan II	91.73	A	Sangat Baik	132	Tercapai
33	Balai KIPM Tarakan	91.55	A	Sangat Baik	24	Tercapai
34	Stasiun KIPM Palangkaraya	91.25	A	Sangat Baik	20	Tercapai
35	Balai KIPM Jakarta II	91.15	A	Sangat Baik	43	Tercapai
36	Balai KIPM Balikpapan	91.11	A	Sangat Baik	70	Tercapai
37	Balai Uji Standar KIPM	91.06	A	Sangat Baik	23	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	90.87	A	Sangat Baik	63	Tercapai
39	Balai KIPM Lampung	90.21	A	Sangat Baik	42	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	89.92	A	Sangat Baik	86	Tercapai
41	Stasiun KIPM Mamuju	89.48	A	Sangat Baik	14	Tercapai
42	Balai KIPM Surabaya I	89.43	A	Sangat Baik	143	Tercapai
43	Stasiun KIPM Merak	89.37	A	Sangat Baik	64	Tercapai
44	Stasiun KIPM Sorong	89.21	A	Sangat Baik	26	Tercapai
45	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.62	B	Baik	24	Tidak Tercapai
46	Stasiun KIPM Kendari	86.69	B	Baik	53	Tidak Tercapai
47	Stasiun KIPM Gorontalo	85.31	B	Baik	38	Tidak Tercapai

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Nama Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan I 2025**

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
2	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
3	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	84	3.83	3.8	3.8	3.82	3.83	3.79	3.82	3.83	3.82	95.4	A	Sangat Baik	
4	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1451	3.81	3.8	3.79	3.8	3.79	3.74	3.74	3.81	3.77	94.57	A	Sangat Baik	
5	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	202	3.82	3.78	3.72	3.8	3.78	3.54	3.62	3.79	3.8	93.45	A	Sangat Baik	
6	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	503	3.77	3.77	3.71	3.75	3.76	3.62	3.65	3.78	3.75	93.21	A	Sangat Baik	
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.8	92.22	A	Sangat Baik	

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
8	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	3	3.67	3.33	3.67	4	4	3.33	3.33	4	3.67	91.67	A	Sangat Baik
9	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	10	3.8	3.3	3.7	3.6	3.7	3.3	3.8	3.8	3.8	91.11	A	Sangat Baik
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	208	3.64	3.56	3.55	3.63	3.65	3.53	3.54	3.63	3.58	89.77	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	24	3.88	3.54	3.58	3.71	3.71	3.38	3.33	3.67	3.42	89.47	A	Sangat Baik
12	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	4	3.75	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	88.19	B	Baik
13	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	11	3.73	3.64	3.36	3.36	3.55	3.36	3.55	3.36	3.64	87.63	B	Baik
14	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	45	3.42	3.42	3.38	3.42	3.42	3.38	3.33	3.42	3.36	84.88	B	Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		2553	3.78	3.76	3.74	3.77	3.77	3.67	3.69	3.77	3.74	93.58	A	Sangat Baik